



Hasil Penilaian Awal Mitra CEPF PFA 1

Juli 2017

LAPORAN PENILAIAN KAPASITAS ORGANISASI MITRA CEPF PFA-1 SULAWESI UTARA MENGGUNAKAN PERANTI

Asesor	:	Adi Nugroho
Lembaga Asesor	:	Penabulu Foundation
Waktu Pelaksanaan	:	1. Perkumpulan Sampiri, 6 Juli 2017 2. Perkumpulan Manengkel Solidaritas, 7 Juli 2017 3. Yayasan IDEP Selaras Alam, 19 Juli 2017 4. Yayasan Ganeca, 9 Juli 2017 5. Perkumpulan YAPEKA, 21 Juli 2017 6. World Conservation Society, 20 Juli 2017

1. PENGANTAR

Proses pelaksanaan penilaian mandiri dengan menggunakan model PERANTI dan CSTT telah dilakukan pada 6 lembaga mitra CEPF untuk PFA 5 pada kawasan Sulawesi. Kelima organisasi tersebut berada di beberapa lokasi seperti di Provinsi Sulawesi Utara seperti Perkumpulan Sampiri (Kepulauan Sangir), Perkumpulan Manengkel Solidaritas (Kota Manado), Yayasan Rumah Ganeca (Tomohon); Provinsi Jawa Barat, seperti Wildlife Conservation Society Indonesia Program (Bogor), Perkumpulan YAPEKA (Bogor) Sulawesi Utara, Kota Manado, Tomohon Sulawesi Utara, dan Provinsi Bali yaitu Yayasan Idep Selaras Alam (Bangli).

Proses pelaksanaan penilaian dilakukan pada tanggal 5-9 dan 17-21 Juli 2017 dengan memastikan para mitra telah melakukan penilaian mandiri (secara internal) dengan mempersiapkan dokumen untuk mendukung penilaian PERANTI dilakukan melalui proses kelompok diskusi terfokus berbasis panduan PERANTI dan CSTT.

2. METODOLOGI

Perangkat PERANTI (+) yang telah dipersiapkan oleh Yayasan Penabulu menjadi bagian dari panduan melakukan pengkajian pemetaan dan kebutuhan mitra CEPF Burung Indonesia. Asesor menggunakan dua (2) metode dalam pengkajian ini, yaitu:

1. **Kelompok Diskusi Terfokus.** Mitra CEPF diharapkan telah mengisi PERANTI dengan mandiri bersama pemangku kepentingan internal dan didiskusikan kembali bersama asesor untuk mendapatkan gambaran yang lebih obyektif atas penilaian yang telah dilakukan secara mandiri. Dokumen pendukung diharapkan dipersiapkan untuk memastikan penilaian yang dilakukan sesuai dengan dokumen yang tersedia sehingga asesor dapat memverifikasi penilaian dengan baik.
2. **Studi Dokumen.** Dokumen pendukung sebagai pelengkap dan pendukung penilaian menjadi dasar asesor memastikan penilaian yang dilakukan sesuai dengan koridor atau dapat dibuktikan.

Berdasarkan dua metode di atas, asesor melakukan analisis berdasarkan bukti dan diskusi, dan jika diperlukan asesor melakukan komunikasi untuk memastikan ulang penilaian dilakukan dengan lebih

obyektif. Meskipun demikian, tidak semua mitra CEPF melakukan penilaian mandiri PERANTI secara internal. Dengan keterbatasan waktu, asesor juga memfasilitasi pengisian PERANTI pada saat penilaian dilakukan

Parameter Kualitatif:

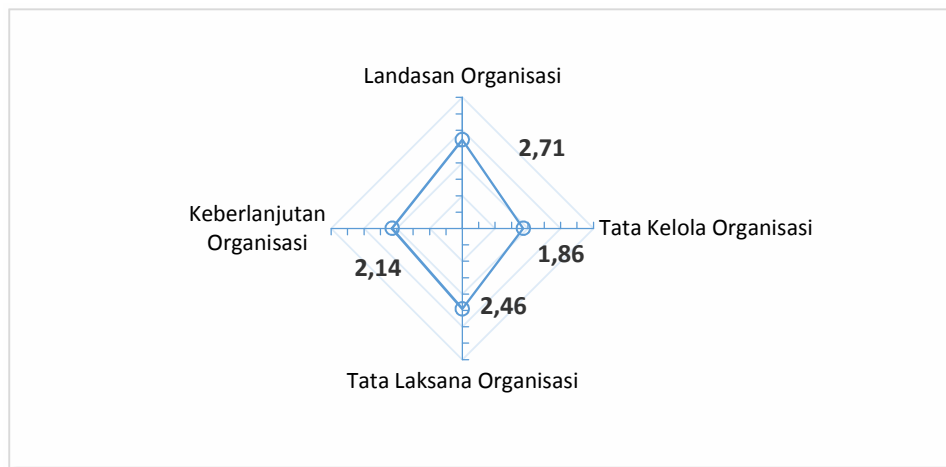
- Skor 0 : Tidak ada kebijakan dan tidak ada praktik dalam lembaga pada area yang diukur
- Skor 1 : Tidak ada kebijakan, namun ada praktik sesuai nilai transparansi dan akuntabilitas pada area yang diukur tetapi masih terbatas
- Skor 2 : Kebijakan sudah ada dan sudah dipraktikkan, namun belum konsisten
- Skor 3 : Kebijakan sebagian besar sudah dipraktikkan secara konsisten, namun belum semua personil memahaminya
- Skor 4 : Semua pihak baik internal dan eksternal yang bekerjasama dengan lembaga mempraktikkan kebijakan lembaga secara konsisten. Kebijakan lembaga sudah dievaluasi dan dilakukan perbaikan oleh lembaga.

Parameter Penilaian:

- 0 – 0,99 : Buruk
- 1,00 – 1,99 : Kurang
- 2,00 – 2,99 : Cukup
- 3,00 – 4,00 : Baik

3. TEMUAN PADA SETIAP AREA TINJAUAN

Hasil PERANTI terhadap Mitra CEPF PFA-1 sebagai berikut. Landasan Organisasi memperoleh skor 2,71 yang artinya Cukup. Tata Kelola Organisasi memperoleh skor 1,86 yang artinya Kurang. Tata Laksana Organisasi memperoleh skor 2,46 yang artinya Cukup. Keberlanjutan Organisasi memperoleh skor 2,14 yang artinya Cukup. Penjelasan dalam grafik dapat dilihat di bawah ini.



3.1. Landasan Organisasi (2,77 – Cukup)

Dalam penilaian yang dilakukan asesor pada enam organisasi mitra CEPF, terdapat klasifikasi organisasi pelaksana proyek yang memiliki keberagaman tingkat organisasi baik dari level organisasi komunitas yang berskala lokal, regional, nasional, maupun internasional. Dominasi bentuk organisasi lebih banyak

memilih bentuk “perkumpulan” dibandingkan “yayasan” dan empat organisasi berdiri relatif muda meskipun para pelaku utamanya merupakan aktifis NGO yang memiliki portofolio cukup lama pada isu konservasi.

Dalam konteks landasan organisasi seperti “legal entity”, organisasi mitra CEPF memiliki legal entity yang sudah diperbaharui sesuai dengan konteks Indonesia. Penetapan posisi dan peran organisasi cukup jelas dalam ‘legal entity’ maupun dalam AD/ART yang dimiliki mitra CEPF bekerja di Sulawesi Utara.

Penyesuaian landasan organisasi masih dirasakan perlu untuk memastikan visi dan misi yang telah ditetapkan organisasi dengan pengembangan program atau proyek yang sedang dijalankan. Meskipun demikian mitra PF 5 pada wilayah Sulawesi relatif memiliki landasan organisasi yang cukup baik (skor 2,77).

3.2. Tata Kelola Organisasi (2,43 – Cukup)

Peran *board* telah dipisahkan sebagai upaya organisasi secara serius menjalankan mandat organisasi secara baik, meskipun pada organisasi yang relatif baru peran dan posisi board belum dimaksimalkan secara baik dan maksimal dalam menjalankan roda organisasi karena keterbatasan organisasi.

Pada beberapa organisasi yang relatif baru, perencanaan strategis sebagai turunan visi dan misi belum banyak dipahami dan dimiliki oleh organisasi mitra CEPF. Pemahaman kebutuhan perencanaan strategis tersebut tidak lepas dari keterbatasan sumber daya pendanaan dan pemahaman pengelolaan organisasi dan proyek /program dalam menjalankan peran dan tanggung jawab strategis sebagai organisasi yang akuntabel.

Peran *board* dalam menjalankan fungsinya juga masih terbatas pada teks *legal entity*, dan belum dijalankan secara maksimal untuk memastikan peran pengawasan dan arah organisasi dalam menjalankan perannya, kecuali pada organisasi yang sudah mapan seperti, Perkumpulan YAPEKA, Yayasan IDEP Selaras Alam, dan Wildlife Conservation Society – Indonesia Program.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) juga telah dimiliki oleh masing-masing mitra CEPF, meski dalam bentuk RKT proyek (karena hanya memiliki keterbatasan sumber pendanaan) dan belum menjadi satu RKT kelembagaan atau organisasi.

Dari proses penilaian yang dilakukan untuk enam mitra CEPF diperoleh situasi pada kapasitas ini Kurang (skor 2,43) meski memang perlu dioptimalkan peran board, memaksimalkan perencanaan strategis, dan rencana kerja tahunan

3.3. Tata Laksana Organisasi (2,46 – Cukup)



Kelolaan Layanan Program. Mitra CEPF memiliki relevansi dengan tujuan konservasi. SOP dimiliki oleh masing-masing mitra CEPF dari yang sederhana sampai pada yang terperinci. Pelaksanaan proyek juga mampu dilaksanakan dengan baik meski tidak semua tepat waktu, dan sukses dalam pencapaian target proyek. Di lain pihak, sistem monitoring dan evaluasi juga dimiliki oleh masing-masing mitra CEPF meskipun dilakukan secara sederhana berbasis proyek tetapi juga ada yang memiliki SOP dalam melakukan monitoring dan evaluasinya.

Kelolaan Keuangan dan Administrasi. Sebagian mitra CEPF tidak semua memiliki prosedur keuangan yang tertulis tetapi proses layanan terhadap program dan keuangan dapat dijalankan dengan baik dan sebagian mitra CEPF memiliki prosedur yang cukup baik karena sudah memiliki sistem organisasi yang cukup baik dan mapan dalam ketersediaan sumber daya.

Kelolaan Sumber Daya Manusia (SDM). Mitra CEPF memiliki struktur organisasi yang jelas dan memiliki SOP SDM, dan memiliki kecukupan staf dalam menjalankan program. SDM Organisasi juga memiliki pengalaman, ketrampilan dan relawan untuk mendukung berjalannya program/proyek yang sedang dijelankannya.

Kelolaan Informasi, Data, dan Pengetahuan. Tidak semua mitra CEPF memiliki kelolaan informasi, data dan pengetahuan yang cukup baik. Informasi dan data masih berorientasi pada proyek dan belum dikelola secara kelembagaan dan menjadi bank data dan pengetahuan organisasi serta digukaan untuk kepentingan organisasi. Data dan pengetahuan sudah terdokumentasi tetapi masih tersebar di beberapa *person in charge* dan departemen lainnya. Meskipun demikian beberapa organisasi telah memproduksi pengetahuan dalam bentuk materi, panduan, dan menggunakan data dan informasi sebagai pengembangan pengetahuan dalam pengembangan program selanjutnya.

Kelolaan Komunikasi Publik dan Kemitraan. Mitra CEPF memiliki akuntabilitas publik yang cukup baik meski hanya pada terbatas pada stakeholder tertentu. Citra organisasi dikenal dan cukup baik diterima oleh semua pihak dan stakeholders. Kolaborasi bersama dengan CSO atau NGO dilakukan cukup baik dan saling membutuhkan karena memiliki kepentingan yang sama dalam konservasi. Dan tidak hanya itu, peran strategis mitra CEPF juga diperhitungkan dalam memimpin kolaborasi dalam bentuk jaringan bersama dengan institusi lainya selain CSO/NGO. Selain itu, produksi materi untuk kampanye koservasi dan organisasi serta pemanfaatan umpan balik menjadi perhatian cukup baik dan diterima oleh banyak pihak.

3.4. Keberlanjutan (2,14 – Cukup)

Mitra CEPF yang bekerja di wilayah Sulawesi Utara lebih banyak bertumpu pada pengembangan proposal dari jaringan kemitraan dan donor yang sudah dimiliki. Meskipun telah dikembangkan model keberlanjutan dalam bentuk *crowd funding*, atau model lain tetapi belum maksimal dilakukan.

4. KEBUTUHAN PENINGKATAN KAPASITAS

Mitra CEPF yang bekerja di Sulawesi Utara sebagian besar memiliki syarat administrasi yang cukup meskipun disparitas kapasitas masing-masing mitra relatif sangat tinggi, khususnya organisasi dengan skala lokal dan relatif baru didirikan (kurang dari 5 tahun). Meskipun demikian sumber daya manusia relatif cukup memiliki pengalaman organisasi dan portofolio konservasi sebagai salah satu mandat organisasi dan pengelolaan programnya.

Sedangkan dalam tata kelola organisasi, relatif cukup bagus dalam pengelolaannya, meski masih ada satu lembaga yang tidak secara maksimal baik dalam pengelolaannya baik secara organisasi maupun penataan program kelembagaan. Keberlanjutan program masih bergantung pada penyusunan dan kompetisi proposal, serta membangun jaringan kerja bersama dengan lembaga lainnya.

NAMA LEMBAGA	INSTRUMEN PENILAIAN ORGANISASI			
	LANDASAN ORGANISASI	TATA KELOLA ORGANISASI	TATA LAKSANA ORGANISASI	KEBERLANJUTAN ORGANISASI
Perkumpulan Sampiri	2,0	0,67	1,54	1,50
Perkumpulan Manengkel Solidaritas	3,0	1,00	2,42	1,25
Yayasan Ganeca	0,67	0,33	0,80	0,00
Yayasan IDEP Selaras Alam	4,00	4,00	3,04	3,25
Perkumpulan YAPEKA	2,67	1,67	2,94	3,00
Worldlife Conservation Society – Indonesia Program	4,00	3,67	3,79	3,25

	BAIK
	CUKUP
	KURANG
	BURUK

4.1. Landasan Organisasi

Legal entity yang merupakan landasan organisasi dari enam organisasi yang menjadi target *assessment* terdapat dua organisasi yang memiliki legal entity yang perlu didiskusikan kembali mengingat terdapat perbedaan wilayah dan hukum (antar Negara), yaitu:

1. Yayasan Rumah Ganeca Tomohon, Sulawesi Utara, organisasi ini merupakan organisasi berbasis “yayasan” yang merupakan kepanjangan tangan Yayasan Rumah Ganeca di DKI Jakarta,

tepatnya dengan alamat Jl. Utan Kayu No.80, RT.2/RW.9, Utan Kayu Utara, Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13120, Telp. (021) 8563371.

Meskipun mekanisme pengambilan keputusan merupakan otonomi Yayasan Rumah Ganeca Tomohon, tetapi pemilahan dan mekanisme kerja belum tekstual menjelaskan relasi antara Yayasan Rumah Ganeca yang berada di pusat (DKI Jakarta) dengan daerah, meskipun nilai aset cukup tinggi di wilayah kerja Sulawesi Utara tetapi belum didukung landasan organisasi seperti *legal entity* yang cukup bisa menjelaskan relasi kerja pusat dan daerah.

2. Wildlife Conservation Society – Indonesia Program. Organisasi ini merupakan organisasi non pemerintah internasional yang bekerja sejak tahun 1960 dan diperbarui menggunakan MoU dengan KLHK tahun 1995, 1997, dan tahun terakhir pembaruan adalah tahun 2015 (terlampir). Basis landasan organisasi ini berada di New York, Amerika Serikat. Berbeda dengan International NGO yang bekerja di Indonesia yang harus menyusun landasan organisasi yang tunduk dengan mekanisme Undang Undang Nomor 28 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan dengan membuat lembaga baru berbasis landasan hukum atau berbadan hukum di Indonesia, seperti yang telah dilakukan Save the Children dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik Indonesia, Mercy Corps dengan Yayasan Mercy Cors Indonesia, atau bentuk lainnya yang sudah dilakukan oleh lembaga NGO Internasional yang bekerja di wilayah hukum Indonesia.

4.2. Tata Kelola Organisasi

Mitra CEPF perlu meningkatkan pengelolaan organisasinya dengan memastikan optimalisasi peran dan posisi board dan dibarengi dengan memastikan penyusunan perencanaan strategis bagi organisasi yang belum memiliki untuk menurunkan visi dan misi yang dimiliki oleh setiap organisasi berbasis pada ketersediaan sumber daya dan kemampuan organisasi, seperti: Perkumpulan Sampiri, Perkumpulan Manengkel Solidaritas, dan Yayasan Rumah Ganeca.

Penyusunan SOP organisasi sebagai turunan dari AD/ART yang dimiliki untuk memastikan pengelolaan organisasi lebih baik juga masih diperlukan bagi mitra CEPF khususnya lembaga yang relatif baru berdiri dan belum memiliki perencanaan strategis.

4.3. Tata Laksana Organisasi

Mitra CEPF dalam telah memiliki kemampuan cukup baik dalam melaksanakan program meskipun beberapa organisasi mitra belum memiliki SOP Pengelolaan Program atau proyek sebagai dasar dalam pelaksanaan proyek dengan pihak lain. Sistem administrasi telah mampu dipenuhi dengan baik, meskipun sistem keuangan lebih berorientasi pada proyek belum berbasis organisasi. Penguatan dalam penyusunan SOP organisasi dan pelaksanaan proyek perlu dilakukan untuk memperkuat kapasitas organisasi dalam pertanggungjawabannya.

Berikut tabel yang menunjukkan penilaian PERANTI yang merupakan turunan dari penilaian Tata Laksana Organisasi masing-masing

NAMA LEMBAGA	ASPEK KELOLAAN PROGRAM DAN LAYANAN	ASPEK KELOLAAN KEUANGAN DAN ADMINISTRASI	ASPEK KELOLAAN SDM	ASPEK KELOLAAN INFORMASI DATA DAN	ASPEK KELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK DAN

				PENGETAHUAN	KEMITRAAN
Perkumpulan Sampiri	2,17	1,25	1,42	1,67	1,20
Perkumpulan Manengkel Solidaritas	3,17	2,08	2,50	2,33	2,00
Yayasan Ganeca	0,67	0,58	1,00	0,33	1,40
Yayasan IDEP Selaras Alam	3,67	3,50	2,83	2,00	3,20
Perkumpulan YAPEKA	3,50	2,83	3,17	2,00	3,20
Worldlife Conservation Society – Indonesia Program	3,83	4,00	4,00	3,33	3,80

	BAIK
	CUKUP
	KURANG
	BURUK

4.4. Keberlanjutan

Hampir semua organisasi masih bertumpu pada donor atau pihak ketiga melalui kompetisi penyusunan proposal dan mitra jaringan lainnya memenuhi keberlanjutan organisasi. Model keberlanjutan melalui model *fund raising* belum dikembangkan dalam bentuk lain. Dan jika mitra CEPF sudah memiliki bentuk *fund raising* yang mendukung keberlanjutan organisasi, belum secara maksimal mampu menyumbang pengelolaan organisasi secara mandiri.

Penilaian PERANTI yang dilakukan oleh asesor diperoleh kebutuhan bagi mitra CEPF untuk ditingkatkan kapasitas kelembagaannya.

Organisasi	Landasan Organisasi	Tata Kelola Organisasi	Tata Laksana Organisasi			Kebutuhan Peningkatan Kapasitas lainnya	
		Perencanaan Strategis	Program Management Training	Financial Management Training	Resource Mobilization Training	Management Information System	Pengelolaan Pengetahuan
Perkumpulan Sampiri	-	X	X	X	X	X	X
Perkumpulan Manengkel Solidaritas	-	X	X	X	X	X	-
Yayasan Rumah Ganeshha	X	X	X	X	X	-	X
Yayasan Idep Selaras Alam	-	-	-	-	-	X	X
Perkumpulan YAPEKA	-	-	-	-	-	X	X
Worldlife Conservation Society – Indonesia Program	X	-	-	-	-	-	-

5. KESIMPULAN

Secara garis besar, Mitra CEPF memiliki kapasitas dalam mengelola proyek dan masih dalam batasan mandat konservasi. Dari empat kerangka penilaian, ada beberapa hal yang menjadi perhatian yaitu:

1. Landasan organisasi, berkaitan dengan legal entity dan/atau badan hukum masih perlu ada perbaikan dan penyesuaian (WCS-Indoensia Program dan Yayasan Ganeca)
2. Tata Kelola Organisasi, berkaitan dengan peran board dan perencanaan strategis serta SOP pendukung organisasi (kelembagaan) yaitu: Perkumpulan Sampiri, Perkumpulan Manengkel Solidaritas, dan Yayasan Geneca.
3. Tata Laksana Organisasi, terdapat kebutuhan dalam penyusunan dokumen panduan atau SOP dalam pengelolaan program untuk memastikan akuntabilitas proyek dan program kelembagaan, pengelolaan sistem database dan pengelolaan pengetahuan yang dapat dikelola oleh organisasi atau lembaga dari pembelajaran proyek dan program yang telah dan sedang berjalan.
4. Keberlanjutan, mitra CEPF masih bergantung pada model fund raising berbasis proposal dengan pihak ketiga dan belum memaksimalkan dampak program yang ada untuk membangun model fund raising kelembagaan.

6. REKOMENDASI

1. Landasan organisasi sebagai dasar legal entity organisasi bekerja di wilayah hukum Indonesia dan untuk memperkuat basis legal, terdapat dua lembaga yang perlu mendapatkan perhatian yaitu: 1) Worldlife Conservation Society – Indonesia Program, berkaitan dengan ketiadaan badan hukum di Indonesia karena hanya didasarkan pada MoU dengan KLHK, dan 2) Yayasan Rumah Ganeca Tomohon, yang merupakan organisasi cabang dari Yayasan Rumah Ganeca Jakarta, yang sekarang tidak jelas keberadaannya.
2. Tata Kelola Organisasi, terdapat tiga mitra CEPF yang belum secara maksimal melakukan penataan organisasi dengan memaksimalkan board dan perencanaan strategis nya dalam menjalankan mandat (visi dan misi) karena relatif merupakan organisasi yang masih baru dan memiliki keterbatasan pengelolaan pendanaan.
3. Tata Laksana Organisasi, terdapat empat organisasi yang belum memiliki panduan atau SOP pelaksanaan program sehingga memerlukan peningkatan kapasitas dalam mengoptimalkan penatalaksanaan organisasinya.
4. Keberlanjutan, hampir semua organisasi masih bergantung pada pendanaan donor dan belum memaksimalkan potensi dampak program untuk keberlangsungan organisasi.

Lampiran

1. Laporan Narasi Penilaian Mitra CEPF
2. Laporan CSTT